

Kontestasi Ketahanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Sosioideologis

Muh Izza,¹ Mokhammad Khafidzin Fahmi,² Amalina Istikomah,³ Ayu Diah Widiana⁴

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid¹

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid²

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid³

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid⁴

¹Email : muh.izza@uingusdur.ac.id¹

²Email : mokhammadkhafidzinfahmi@mhs.uingusdur.ac.id²

³Email : amalinaistikomah@mhs.uingusdur.ac.id³

⁴Email : ayudiahwidiana@mhs.uingusdur.ac.id⁴

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan mengklaji ketahanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selama ini menjadi sorotan karena lahir dari keinginan masyarakat bawah. Ketahanan lembaga keuangan tidak selalu hanya berasal dari rasionalitas sisi finansial saja seperti fenomena LDR, NPL dan sejenisnya bahkan memiliki keterkaitan dengan aspek lain seperti kondisi social dan ideologisnya. Hal seperti ini lepas dari sorotan para akademisi dan praktisi bahkan media sekalipun. Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan basis sosioideologis. Metode pengumpulan data memakai dokumentasi, wawancara dan sejumlah instrument melalui gform pada 10 LKMS di Kabupaten dan Kota Pekalongan Jawa Tengah. Hasil riset menunjukkan ada dua corak kelembagan LKMS yaitu 1) LKMS bercorak Baitul Mal wa Tamwil melalui pengelolaan dana social dan LKMS bercorak afiliasi keormasan melalui branding religuitas produk. Ketahanan LKMS berangkat dari 8 kriteria yaitu 1) adaptasi teknologi, 2) inovasi produk, 3) peran sosial, 4) investasi 5) kepercayaan masyarakat, 6) pemasaran produk, 7) kolaborasi kelembagaan dan 8) pengalama keuangan Kontestasi pola ketahanan LKMS berbasis sosioideologis berorientasi pada tiga aspek yaitu orientasi ketahanan normative mencakup stabilitas keuangan, orientasi ketahanan ideologis melalui keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan pasar seperti inivasi produk religius, pemasaran, investasi, dan orientasi ketahanan sosiologis melalui keseimbangan antara adaptasi teknologi, pelaksanaan CSR, dan kepercayaan

Kata kunci: Kontestasi, Ketahanan, Sosiologis, ideologis, LKMS.

Abstract:

This paper aims to examine the resilience of Islamic Microfinance Institutions which have been in the spotlight because they were born from the desires of the lower classes. The resilience of financial institutions does not always come from financial rationality alone, such as the LDR, NPL and similar phenomena, and is even related to other aspects such as social and ideological conditions. This kind of thing escapes the spotlight of academics and practitioners, even the media. This type of research is field research with a socio-ideological approach. The data collection method uses documentation, interviews and a number of instruments through gforms at 10 LKMS in Pekalongan Regency and City, Central Java. The research results show that there are two institutional patterns of LKMS, namely 1) LKMS with the Baitul Mal wa Tamwil pattern through the management of social funds and LKMS with the pattern of mass organization affiliation through product religious branding. The resilience of LKMS is based on 8 criteria, namely 1) technological adaptation, 2) product innovation, 3) social role, 4) investment, 5) public trust, 6) product marketing, 7) institutional collaboration and 8) financial experience. The contestation of the LKMS resilience pattern based on socio-ideology is oriented towards three aspects, namely normative resilience orientation including financial stability, ideological resilience orientation through a balance between sharia values and market needs such as religious product innovation, marketing, investment, and sociological resilience orientation through a balance between technological adaptation, CSR implementation, and trust.

Keywords: Contestation, Resilience, Sociological, Ideological, LKMS

PENDAHULUAN

Sejak diperkenalkannya standar mata uang dunia pada Perang Dunia II hingga

sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa perbankan merupakan institusi yang sangat riskan terkena krisis. Faiz (2010) menyebut

hampir tidak ada satu negara pun yang tidak terimbas dampak gelombang krisis. Salah satunya tragedi krisis perbankan yang cukup pahit dalam sejarah adalah di Amerika Serikat tahun 1931. Krisis ini merambat ke Nigeria 1945-1955 selanjutnya mengalami keberlanjutan di Inggris 1973-1974. Sementara di Asia muncul 1997-1998, kemudian berlanjut di Bank Run di Northern Rock tahun 2007 dan runtuhnya Bear Stearns 2008 (Ascarya, 2009). Indonesia di tahun 2008 juga terkena imbas krisis meski terasa di akhir 2008 atau triwulan IV (<https://www.bi.go.id/id/publikasi>)

Krisis tahun 2008 yang terjadi di Indonesia tidak separah di tahun 1997-1998. Jika di tahun 1997-1998 berdampak terlikuidasinya puluhan perbankan nasional dalam negeri sedang di tahun 2008 tidak ada. Meskipun demikian terjadi spekulasi terhadap suatu perbankan yang terkena dampak krisis, terlepas dari nuansa politis dan kepentingan. Hal ini karena pasca tahun 2009 peristiwa tersebut mulai ada titik terangnya.

Memang ada kausalitas terjadinya suatu krisis. Krisis terjadi bukan hanya faktor dari dalam saja tetapi juga dari luar. Kebijakan otoritas moneter yang tidak mampu menghalau krisis, *blunder*-nya kebijakan fiskal dan minimnya devisa negara menjadi penyebab nilai tukar mata uang mengalami penurunan, termasuk kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak stabil. Maka tentunya beban negara semakin bertambah yangimbasnya mengalir juga ke pihak swasta. Ironisnya *supplay* dana negara berasal dari hutang luar negeri, defisit ekspor dan ketergantungan impor.

Tindakan penyelamatan terhadap suatu krisis keuangan bukannya hanya pada perbankan saja, termasuk didalamnya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini patut diselamatkan karena memiliki fungsi yang sama dengan perbankan (Soemitra, A., 2017). Seluruh lembaga keuangan wajib mengelola dananya meski terkadang harus berhadapan dengan kebijakan moneter. Dalam kontek penyelamatan ini antar lembaga keuangan satu dengan yang lain memiliki solusi berbeda. Ada yang membutuhkan bantuan likuiditas dari bank sentral (BI), tetapi ada pula yang cukup menjaga stabilitas internalnya.

Membahas stabilitas internal pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah (termasuk Bank Syariah) memiliki korelasi dengan pondasi ketahanan di tingkat basis. Sebagaimana pernyataan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), pondasi ini merupakan unsur vital karena berasal dari hubungan kemitraan yang terjalin bukan sekedar motifasi materi akan tetapi kearah satu realitas sosial dan sebuah doktrin idiologis. Kondisi ini tidak dimiliki lembaga keuangan lain yang hanya bermitra dengan pendekatan materi (*financial*). Oleh sebab itu ketika terjadi krisis kondisi Lembaga Keuangan Syariah masih relative tetap eksis (<https://keuangan.kontan.co.id/news/7/09/2018>).

Dominasi keeksisan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia ini nampaknya digerakkan oleh semangat organisasi kemasyarakatan. Sebuah organisasi yang didalamnya menyampaikan pesan-pesan moral. Ketika hubungan kemitraan dilandasi nilai-nilai moralitas itulah maka satu sama lain merasa bertanggung jawab sehingga bisa meminimalisir resiko. Posisi LKMS yang demikian ini memperoleh dua sisi kelebihan, *pertama* keuntungan materi karena didorong oleh suatu regulasi. Ini harus dijalankan oleh setiap lembaga keuangan. *Kedua* keuntungan sosio-idiologis yang kebetulan lingkungan dimana lembaga keuangan tersebut mendukungnya. Porsi yang kedua ini yang tidak ditemukan di lembaga keuangan konvensional sehingga antara LKMS satu dengan yang lainnya melahirkan kontestasi. Kontestasi ini terjadi tidak hanya di Pekalongan saja yang menyebabkan *collaps*-nya LKM-LKMS (Rahman, M. E., 2016). Dinkop dan UKM Kota Pekalongan menyebut dari 328 LKM-LKMS dan koperasi hanya 125 yang aktif (Kepala Dinkop dan UKM Kota Pekalongan, 10/9/2018). Lembaga keuangan dengan basiskultur organisasi kemasyarakatan yang cukup dominan (NU-Muhammadiyah) ternyata jauh lebih eksis dari pada yang lainnya. Studi penelitian ini membahas kontestasi pola ketahanan Lemabga Keuangan Mikro Syariah dengan basis sosio-idiologis di Pekalongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Kontestasi dan Ketahanan Lembaga

Istilah kontestasi merupakan adopsi dari kata *contestation* atau dalam penulisan "kontestan". yang maknanya peserta kontes dalam perlombaan, pemilihan dan sebagainya. Kata kontestasi ini masih hangat dibicarakan terlepas dari salah tidaknya pengaplikasiannya. Bila melihat bentuk katanya *contestation* dalam kamus Bahasa Indonesiabelum baku kecuali

dibicarakan sebagai *boundari* kata *kerjato contest* dan maknanya adalah “bertikai”, “berpolemik”, “berdebat” (*to dispute*).

Definisi lain *contestation* sesinonim dengan kata *disagreement, controversy, debate, dispute, dissension, meski masih bias arti* (<https://www.kompasiana.com/diakses/7/10/2018>). Penyebutan istilah kontestasi dalam konteks penelitian ini lebih tepatnya adalah “perlombaan” sebab kata ini dalam istilah bahasa Indonesia lebih relevan dengan yang ada di Pekalongan yang tidak bisa lepas dari basis kulturalnya. Organisasi kemasyarakatan memiliki kekuatan yang lebih dominan dalam berbagai bidang dalam aktifitas kehidupan.

Selanjutnya kata ketahanan berasal dari kata ‘tahan’ artinya tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya), ‘kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu’ dan ‘cukup’ (sampai atau hingga). Dalam kamus bahasa Indonesia kata ketahanan sendiri berarti ‘perihal tahan’ (kuat, tangguh); baik kuat fisik maupun nonfisik (<https://kbbi.web.id/>). Ada beberapa substansi yang dapat diambil dari kata ketahanan, (1) tetap keadaannya, (2) tangguh dan (3) kuat fisik dan nonfisik. Kata tangguh artinya dan ketahanan untuk mengembangkan kekuatan dalam mengatasi setiap bentuk ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi dari mana pun sumbernya. Kata tangguh ini mengandung dua dimensi nilai, yaitu nilai kondisi dan nilai konsepsi.

Ketahanan sebagai suatu nilai kondisi merupakan keadaan dinamis, yang berisi keuletan dan ketangguhan. Ketahanan ini mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup (Lemhannas, 1986).

Karakteristik LKMS Berbasis Sosio-ideologis

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan institusi keuangan berbasis syariah yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil, terutama yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan formal. Tujuan utamanya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti bagi hasil (mudharabah), kemitraan

(musyarakah), dan pembiayaan barang (murabahah). Selain berperan sebagai lembaga keuangan, LKMS juga mengedepankan nilai-nilai sosial seperti keadilan, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan (Karim, 2019).

Karakteristik sosio-ideologis LKMS didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata dan melarang praktik riba yang dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Ideologi ini tercermin dalam kebijakan dan mekanisme operasional LKMS yang fokus pada karakteristik, yaitu: 1. Sistem Operasional Berbasis Syariah. 2. Fokus pada Masyarakat Marginal. 3. Keseimbangan Nilai Sosial dan Komersial. 4. Partisipasi Komunitas Lokal. 5. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. 6. Pendekatan Pada Pemberdayaan (Chapra, 2000).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam riset ini *field research dengan pendekatan basis sosio-ideologis*. Karakteristik basis sosio-ideologis didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan ekonomi dan solidaritas social (Capra, 2000. *Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan sejumlah instrument melalui gform pada 10 LKMS di Kabupaten dan Kota Pekalongan Jawa Tengah* LKMS tersebut adalah 1) KSPPS BMT Annajah, 2) KSPPS BMT Bahtera, 3) KSPPS BMT Maju Sejahtera (Matra), 4) KSPPS BMT Nusa Kartika 5) KSPPS BMT Istiqlal dan 6) KSPPS BMT Alfairus, 7) KSPPS SMNU Pekalongan, 8) KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen dan 9) KSPPS Koperasi Pemuda Buana, 10) KospinMuh Surya Mentari. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif induktif yang mengandung beberapa aspek (J. Lexy Meleong, 2004):

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi LKMS di Pekalongan

Terkait dengan kondisi LKMS di Pekalongan ini penulis hanya membatasi 10 LKMS. Ini merupakan jumlah representative yang relative mewakili dari LKMS bercorak *Baitul Mal wa Tamwi* dan LKMS bercorak afiliasi keormasan di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Lembaga tersebut dipilih karena telah ada sejak tahun 1993. Meski demikian ada beberapa LKMS relative baru dengan kategori

tertentu terutama dari sisi jumlah nasabah dan jumlah kantor cabangnya. Sejumlah 8 aspek yang mendukung profile lembaga yaitu sejarah pendirian, jumlah nasabah, jumlah aset, jumlah kantor cabang, jumlah produk, peran CSR dan kiprah sosial.

Sejumlah 10 LKMS memiliki dua corak kelembagaan yaitu *pertama* LKMS bercorak *Baitul Mal wa Tamwi* diantaranya 1) KSPPS BMT Annajah, 2) KSPPS BMT Bahtera, 3) KSPPS BMT Maju Sejahtera (Matra), 4) KSPPS BMT Nusa Kartika 5) KSPPS BMT Istiqlal dan 6) KSPPS BMT Alfairus, dan *kedua* LKMS bercorak afiliasi keormasan diantaranya 1) KSPPS SMNU Pekalongan, 2) KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen dan 3) KSPPS Koperasi Pemuda Buana, 4) KospinMuh Surya Mentari.

Tabel 1. Data LKMS

No	Nama LKMS	Tahun Lahir	Jml Cabang	Kantor Pusat
1	BMT Annajah	1994	8	Kab. Pekl
2	BMT Matra	2004	2	Kota Pekl
3	BMT Nusa Kartika	2015	2	Kab Pekl
4	BMT Istiqlal	2016	2	Kota Pekl
5	BMT Bahtera	1996	6	Kota Pekl
6	BMT Alfairus	2015	2	Kota Pekl
7	SMNU Pekalongan	2004	12	Kota Pekl
8	BTM Kajen	2008	12	Kab. Pekl
9	Kopena	1993	8	Kota Pekl
10	KospinMuh	2002	4	Kab. Pekl
Jumlah		10	58	100%

Tabel 1 menjelaskan ada 10 LKMS dengan jumlah kantor cabang masing-masing, tahun lahir dan domisili. 1) BMT Annajah jumlah 8 kantor cabang, tahun lahir 1994 dan domisili Kabupaten Pekalongan, 2) BMT Bahtera jumlah 6 kantor cabang tahun lahir 1996 dan domisili Kota Pekalongan, 3) BMT Maju Sejahtera (Matra) jumlah kantor cabang 2, tahun lahir 2004 dan domisili Kota Pekalongan, 4) BMT Nusa Kartika jumlah kantor cabang 2, tahun lahir 2015 dan domisili

Kabupaten Pekalongan 5) BMT Istiqlal jumlah kantor cabang 2, tahun lahir 2015 dan domisili Kota Pekalongan 6) KBMT Alfairus jumlah kantor cabang 2, tahun lahir 2015 dan domisili Kota Pekalongan, 7) KSPPS SMNU Pekalongan jumlah kantor cabang 12, tahun lahir 2004 dan domisili Kota Pekalongan, 8) KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen jumlah kantor cabang 6, tahun lahir 2008 dan domisili Kabupaten Pekalongan 9) KSPPS Koperasi Pemuda Buana jumlah kantor cabang 8, tahun lahir 1993 dan domisili Kota Pekalongan, 10) KospinMuh Surya Mentari jumlah kantor cabang 5, tahun lahir 2002 dan domisili Kabupaten Pekalongan

Ketahanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keunikan sosio-kultural seperti Pekalongan, Jawa Tengah. Kota ini dikenal dengan budaya batiknya yang kental, yang mencerminkan harmoni antara tradisi dan modernitas. Dalam konteks ini, pola ketahanan LKMS berbasis sosio-ideologis menjadi penting untuk mengintegrasikan kebutuhan ekonomi dengan nilai-nilai sosial dan prinsip syariah. Pola ini mencakup adaptasi terhadap perubahan sosial, penguatan nilai-nilai Islam, serta pengembangan strategi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketahanan sosio-ideologis mengacu pada kemampuan LKMS untuk menjaga keberlanjutan operasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah, sambil menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah. Konsep ini melibatkan tiga elemen utama: adaptasi sosial, inovasi berbasis ideologi Islam, dan penguatan kepercayaan masyarakat. Ketiga elemen ini menjadi fondasi bagi LKMS untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal.

Sebagai kota yang berakar pada tradisi Islam, masyarakat Pekalongan memiliki ekspektasi tinggi terhadap lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan sosial yang signifikan, termasuk meningkatnya permintaan dan efisien. LKMS dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan modern ini dengan mempertahankan identitas

syariah mereka. Diantara pola ketahanan LKMS di Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Adaptasi Teknologi

Adaptasi teknologi menjadi salah satu strategi utama LKMS di Pekalongan untuk menjaga relevansi. Banyak LKMS telah mengadopsi platform digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh nasabah. Teknologi ini mencakup aplikasi mobile untuk pembiayaan, pelaporan transaksi secara real-time, dan sistem manajemen risiko berbasis data. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat tetap menjadi hambatan

2. Ketahanan Inovasi Produk

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, LKMS di Pekalongan terus mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang inovatif. Contohnya adalah pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah untuk usaha kecil, serta produk wakaf produktif yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing LKMS tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Islam.

3. Ketahanan Sosial CSR

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi alat penting bagi LKMS untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Di Pekalongan, banyak LKMS yang memanfaatkan CSR untuk mendukung pelestarian budaya batik, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan pendidikan. Program-program ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LKMS sekaligus memberikan dampak positif bagi komunitas lokal.

4. Ketahanan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat adalah elemen kunci dalam ketahanan sosio-ideologis LKMS. Di Pekalongan, kepercayaan ini didasarkan pada reputasi LKMS dalam menjalankan operasional sesuai syariah dan memberikan pelayanan yang transparan. LKMS terus menjaga kepercayaan ini melalui komunikasi yang terbuka, pelibatan tokoh agama dalam pengambilan keputusan, dan penyediaan laporan keuangan yang akuntabel.

5. Ketahanan Persaingan Pasar

LKMS di Pekalongan juga menghadapi kontestasi ideologis dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Banyak nasabah yang mengharapkan fleksibilitas dan kecepatan layanan yang sering kali menjadi keunggulan lembaga keuangan konvensional. Untuk mengatasi hal ini, LKMS terus berupaya meningkatkan kualitas layanan mereka sambil tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.

6. Ketahanan Kolaborasi

Kolaborasi dengan komunitas lokal menjadi strategi penting bagi LKMS untuk memperkuat pola ketahanan sosio-ideologis mereka. Di Pekalongan, LKMS sering bekerja sama dengan komunitas pengrajin batik, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jaringan tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara LKMS dan masyarakat.

7. Ketahanan dari Pengalaman

Pengalaman LKMS di Pekalongan menunjukkan bahwa ketahanan sosio-ideologis tidak dapat dicapai tanpa pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal. Inovasi yang berhasil adalah yang tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat. Dengan demikian, LKMS dapat tetap relevan dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan komunitas.

8. Ketahanan dalam Mengelola Keuangan

Selain tantangan eksternal, LKMS juga menghadapi tantangan internal dalam menjaga ketahanan sosio-ideologis. Salah satunya adalah memastikan bahwa seluruh staf memahami dan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional. Pelatihan internal dan pengawasan berkala menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi ini.

Pola ketahanan sosio-ideologis LKMS di Pekalongan akan semakin diuji oleh perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah. Namun, dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan adaptasi yang fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat, LKMS memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Inovasi berkelanjutan dan

kolaborasi strategis akan menjadi kunci keberhasilan mereka.

Kontestasi Ketahanan LKMS Berbasis Sosio-ideologis

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebagai kota yang memiliki akar religius yang kuat dan terkenal dengan industri batiknya, Pekalongan menawarkan ekosistem sosial yang unik bagi keberadaan LKMS. LKMS tidak hanya menghadapi tantangan operasional semata, tetapi juga kontestasi ketahanan yang bersifat sosio-ideologis. Kontestasi ini mencakup upaya mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah sambil menjawab dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, nilai-nilai ideologis syariah seperti keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan diuji melalui berbagai tantangan sosial, seperti kepercayaan masyarakat, adaptasi teknologi, dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Di tengah kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional, LKMS juga dihadapkan pada dilema dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan tuntutan pasar. Misalnya, penerapan teknologi dalam operasional LKMS menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, tetapi dapat berbenturan dengan resistensi dari masyarakat yang kurang akrab dengan digitalisasi. Selain itu, program CSR sering kali menjadi alat penting untuk membangun hubungan dengan masyarakat, tetapi implementasinya membutuhkan kepekaan terhadap kebutuhan lokal. Bagian ini akan membahas lebih jauh bagaimana LKMS di Pekalongan berupaya mempertahankan ketahanannya dalam menghadapi kontestasi sosio-ideologis mencakup tiga aspek yaitu 1) Kontestasi Ketahanan normative dalam hal LDR dan NPF 2) kontestasi ketahanan ideologis dalam hal produk, marketing dan investasi 3) Kontestasi ketahanan sosiologis dalam hal adaptasi teknologi, CSR, Kepercayaan

1. Kontestasi Normatif

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Pekalongan, Jawa Tengah, memiliki peran signifikan dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di sektor usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM). Dalam menjalankan fungsinya, LKMS dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam mempertahankan ketahanan normatifnya. Ketahanan normatif mencakup kemampuan LKMS untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah sambil menjaga stabilitas kinerja keuangan, yang salah satunya diukur melalui Non-Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR).

NPL merupakan indikator yang mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dalam portofolio kredit LKMS. Semakin tinggi NPL, semakin besar risiko yang dihadapi lembaga tersebut. Sebaliknya, LDR merupakan rasio yang mengukur seberapa besar dana yang dihimpun LKMS digunakan untuk pembiayaan. Rasio LDR yang ideal mencerminkan efisiensi penggunaan dana sekaligus kestabilan operasional. Kedua indikator ini menjadi alat ukur utama dalam menentukan ketahanan keuangan LKMS, khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat Pekalongan yang mayoritas bergerak di sektor produktif.

Rasio LDR menjadi indikator penting dalam mengukur ketahanan normatif LKMS. Di Pekalongan. Banyak LKMS yang berusaha menjaga LDR dalam batas ideal, yaitu antara 80-90%. Namun, tantangan muncul ketika permintaan pembiayaan lebih tinggi daripada dana yang dihimpun, terutama pada saat puncak aktivitas ekonomi seperti musim panen atau pameran batik. Situasi ini mendorong LKMS untuk mencari sumber pendanaan tambahan, yang sering kali berbenturan dengan prinsip syariah.

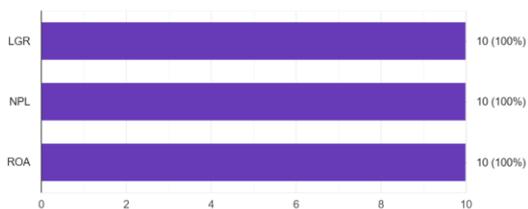
Dalam menjaga stabilitas LDR, LKMS di Pekalongan menggunakan pendekatan syariah, seperti memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shadaqah sebagai modal tambahan. Selain itu, pembiayaan dengan skema qardhul hasan atau pembiayaan tanpa margin keuntungan menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan mendesak tanpa mengganggu likuiditas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah dalam operasional LKMS.

Penggunaan dana berbasis syariah tidak lepas dari tantangan. LKMS sering dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Selain itu, tekanan untuk mempercepat pertumbuhan pembiayaan

kadang memaksa LKMS mengabaikan prinsip kehati-hatian, yang berpotensi meningkatkan risiko keuangan di masa depan.

Beberapa LKMS di Pekalongan mulai menerapkan teknologi digital untuk mengelola risiko NPL dan LDR. Sistem monitoring berbasis digital memungkinkan LKMS untuk memantau pembayaran nasabah secara real-time dan memberikan peringatan dini jika terjadi keterlambatan. Di sisi lain, penggunaan aplikasi digital untuk menarik dana masyarakat membantu meningkatkan rasio penghimpunan dana secara signifikan, sehingga LDR dapat tetap stabil.

LKMS di Pekalongan menunjukkan bahwa ketahanan normatif tidak hanya bergantung pada indikator keuangan seperti NPL dan LDR tetapi juga pada kemampuan untuk menavigasi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, salah satu LKMS berhasil menurunkan NPL secara signifikan dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus nasabah bermasalah. Inovasi semacam ini menjadi contoh bagaimana pendekatan berbasis nilai lokal dapat meningkatkan efektivitas operasional LKMS.



Gambar 1. Kontestasi Ketahanan Normatif melalui Stabilitas Keuangan LDR, NPL dan ROA

Gambar 1 menunjukkan tentang kontestasi ketahanan normative LKMS yang berasal dari kompleksitas sisi rasionalitas keuangan. Masing-masing LKMS sama-sama menjaga keseimbangan rasionalitas keuangan meski satu dengan yang lain memiliki corak dan kondisi berbeda. Bahkan hal tersebut tidak di pengaruhi oleh domisili yang terletak di Kota maupun Kabupaten Pekalongan.

2. Kontestasi Ketahanan Ideologis

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Pekalongan memiliki tantangan besar dalam mempertahankan ketahanan ideologisnya. Ketahanan ideologis ini mencakup kemampuan menjaga nilai-nilai

syariah dalam setiap aspek operasional, mulai dari produk keuangan, strategi pemasaran, hingga pengelolaan investasi. Dalam praktiknya, LKMS tidak hanya bersaing dengan lembaga keuangan konvensional tetapi juga harus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pekalongan, dengan latar belakang budaya religius dan ekonomi berbasis UMKM, menjadi medan yang unik bagi kontestasi ini.

Produk keuangan menjadi salah satu aspek utama yang mencerminkan ketahanan ideologis LKMS. Produk seperti pembiayaan *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), dan *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mematuhi prinsip syariah. Di Pekalongan, produk ini banyak diminati oleh pelaku UMKM, khususnya dalam sektor batik. Tantangan muncul ketika LKMS harus bersaing dengan produk konvensional yang sering kali menawarkan fleksibilitas lebih tinggi.

Guna menjaga relevansi, beberapa LKMS di Pekalongan telah mengembangkan produk berbasis syariah yang inovatif, seperti pembiayaan wakaf produktif dan investasi berbasis *mudharabah*. Produk ini tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga memberikan peluang bagi nasabah untuk berkontribusi pada pembangunan sosial. Misalnya, wakaf produktif digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Meski demikian inovasi produk diatas tidak lepas dari dilema ideologis. LKMS sering kali dihadapkan pada tekanan pasar untuk menawarkan produk yang lebih kompetitif, yang terkadang berisiko melanggar prinsip syariah. Misalnya, ada dorongan untuk meningkatkan margin keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*, yang jika tidak hati-hati, dapat mendekati praktik riba. Di sinilah pentingnya pengawasan syariah yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Aspek lain yang memainkan peran penting dalam ketahanan ideologis LKMS adalah pemasaran (*marketing*). Di Pekalongan, strategi pemasaran berbasis nilai-nilai syariah digunakan untuk menarik nasabah. Misalnya, promosi melalui komunitas religius atau acara-acara keagamaan. Selain itu, pesan-pesan yang disampaikan dalam kampanye pemasaran

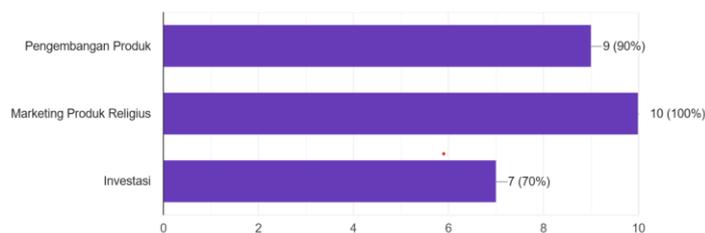
sering kali menekankan pada aspek keberkahan dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Pemasaran berbasis syariah menghadapi tantangan. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional. Akibatnya, LKMS harus bekerja lebih keras untuk mendidik calon nasabah tentang nilai-nilai syariah yang diusung. Selain itu, di era digital, persaingan dalam pemasaran menjadi semakin ketat, dan LKMS harus menemukan cara untuk memanfaatkan teknologi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dimensi lain dari ketahanan ideologis LKMS yaitu investasi. Di Pekalongan, investasi berbasis *mudharabah* dan *musarakah* menjadi pilihan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Skema ini memungkinkan nasabah untuk berbagi keuntungan dan risiko dengan LKMS, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Investasi ini banyak dimanfaatkan untuk mendanai usaha produktif, seperti pengembangan industri batik dan perdagangan lokal.

Investasi berbasis syariah sering kali menghadapi dilema ideologis. LKMS karena harus memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar syariah, seperti bisnis yang terkait dengan alkohol atau perjudian. Selain itu, tekanan untuk menghasilkan keuntungan yang kompetitif dapat mendorong LKMS untuk mengambil risiko yang lebih tinggi, yang berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dalam Islam.

LKMS di Pekalongan menunjukkan bahwa ketahanan ideologis tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tetapi juga pada kemampuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara relevan. Misalnya, KSPPS BMT Bahtera berhasil meningkatkan partisipasi nasabah melalui program investasi berbasis musarakah yang difokuskan pada pengembangan industri batik. Program ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga mendukung pelestarian budaya lokal.



Gambar 2 Kontestasi Ketahanan Ideologis LKMS melalui inovasi produk, pemasaran dan investasi

Gambar 2 menunjukkan tentang kontestasi ketahanan ideologis LKMS melalui tiga hal, *pertama* kontestasi tentang inovasi produk terdapat sejumlah mayoritas yang selalu mengembangkan inovasi produk (sejumlah 9 LKMS), *kedua* kontestasi tentang pemasaran produk semua LKMS hampir memasarkan produknya di semua pasar yang ada di Kota maupun Kabupaten Pekalongan, dan *ketiga* kontestasi tentang investasi masing-masing lembaga menyesuaikan target investasi yang ada dilembaganya. Bahkan hanya 7 lembaga yang memiliki target pengembangan investasi di Kota maupun Kabupaten Pekalongan.

3. Kontestasi Ketahanan Sosiologis

Tantangan unik LKMS di Pekalongan dalam mempertahankan keberlanjutan operasionalnya yaitu menjaga dinamika sosial yang terus berkembang. Ketahanan sosiologis menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis antara LKMS dengan masyarakat sekitar. Tiga elemen utama yang memengaruhi ketahanan sosiologis ini adalah adaptasi teknologi, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Di era digital, adaptasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak bagi LKMS. Di Pekalongan, banyak LKMS telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti penggunaan media sosial, aplikasi digital, pendaftaran nasabah, pelaporan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan. Langkah ini tidak hanya mempercepat layanan tetapi juga meningkatkan akurasi data. Tantangan utamanya adalah literasi digital masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro.

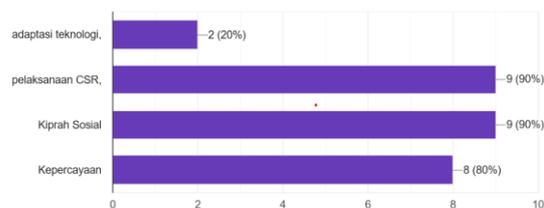
Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa LKMS di Pekalongan telah mengembangkan solusi digital yang ramah

pengguna dan berbasis lokal. Misalnya, aplikasi dengan antarmuka sederhana yang memungkinkan nasabah untuk memeriksa saldo, mengajukan pembiayaan, atau melacak pembayaran secara mandiri. Pelatihan literasi digital juga dilakukan secara berkala untuk membantu nasabah memahami manfaat teknologi. Langkah ini membuktikan bahwa adaptasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat hubungan sosial dengan nasabah.

Meski demikian proses digitalisasi juga menghadirkan dilema sosiologis. Di satu sisi, teknologi meningkatkan aksesibilitas layanan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa digitalisasi dapat mengurangi interaksi personal antara LKMS dan nasabah, yang selama ini menjadi salah satu keunggulan lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu, LKMS di Pekalongan berupaya menjaga keseimbangan antara layanan berbasis teknologi dan pendekatan personal untuk memastikan kepercayaan nasabah tetap terjaga. (Instrumen)

Kemudian program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi alat penting bagi LKMS untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Di Pekalongan, CSR sering kali difokuskan pada kegiatan yang mendukung keberlanjutan sosial, seperti pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pelestarian lingkungan. Misalnya, beberapa LKMS telah meluncurkan program pelatihan bagi pengrajin batik untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi persaingan global.

Meskipun program CSR memiliki dampak positif, keberlanjutannya sering kali menjadi tantangan. Banyak LKMS yang menghadapi keterbatasan anggaran untuk menjalankan program CSR secara konsisten. Selain itu, ada tekanan untuk memastikan bahwa program CSR tidak hanya bersifat simbolis tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. LKMS di Pekalongan telah mencoba mengatasi ini dengan menggandeng mitra strategis, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, untuk memperluas cakupan program CSR mereka.



Gambar 3 Kontestasi Ketahanan Sosiologis melalui adaptasi teknologi, peran CSR, kiprah sosial dan kepercayaan

Gambar 3 menunjukkan tentang kontestasi ketahanan sosiologis LKMS melalui 4 hal yaitu adaptasi teknologi, peran CSR, kiprah sosial dan kepercayaan masyarakat. Melalui adaptasi teknologi LKMS belum banyak memanfaatkan teknologi seperti aplikasi e-mobile lembaga dan variannya. Untuk peran CSR secara umum banyak berperan memberikan dana sosial bagi masyarakat sekitar term. Hal ini juga dibarengi dengan kiprah sosial personalitas dilembaga tersebut dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal adaptasi teknologi, peran CSR, kiprah sosial dan entang kepercayaan masyarakat masing-masing memiliki relativitas perbedaan satu sama lain karena lahir dari elemen-elemen masyarakat yang relative tidak sama.

Kepercayaan masyarakat merupakan aset utama bagi LKMS. Di Pekalongan, kepercayaan ini sering kali didasarkan pada reputasi lembaga dalam mematuhi prinsip syariah dan memberikan layanan yang adil. Kepercayaan bisa rapuh terutama jika terjadi masalah seperti pembiayaan bermasalah atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, LKMS harus berupaya keras untuk menjaga integritas mereka melalui komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang konsisten.

Beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat atau ulama sebagai penasihat syariah yang memberikan jaminan bahwa semua operasional LKMS sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan dan keberhasilan program CSR juga membantu membangun kepercayaan.

Memang membangun kepercayaan masyarakat tidak selalu berjalan mulus. LKMS sering kali dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, seperti bunga pembiayaan yang lebih rendah atau layanan

yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, kepercayaan bisa terganggu. Oleh karena itu, LKMS harus mampu menyeimbangkan antara memenuhi harapan masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan mereka.

LKMS di Pekalongan telah memanfaatkan hubungan dekat dengan komunitas lokal sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan sosiologis mereka. Kolaborasi dengan komunitas lokal tidak hanya membantu memperluas jaringan nasabah tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LKMS. Misalnya, program pengelolaan dana berbasis komunitas telah membantu menciptakan rasa kepemilikan bersama, sehingga nasabah merasa lebih terlibat dalam operasional LKMS.

LKMS di Pekalongan menunjukkan bahwa ketahanan sosiologis tidak hanya bergantung pada adaptasi teknologi atau pelaksanaan program CSR, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan sosial masyarakat. Inovasi yang didasarkan pada nilai-nilai lokal dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan LKMS dalam menjaga relevansi dan kepercayaannya (Instrumen)

KESIMPULAN

Hasil kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa ketahanan sosio-ideologis LKMS di Pekalongan mencerminkan integrasi antara stabilitas keuangan, nilai-nilai syariah dan kebutuhan sosial. Ada 8 pola ketahanan LKMS di sini yaitu adaptasi teknologi, inovasi produk, peran sosial CSR, kepercayaan masyarakat, pemasaran produk di pasar, ketahanan kolaborasi, ketahanan dalam pengalaman, ketahanan dalam mengelola keuangan.

Kontestasi pola ketahanan LKMS berbasis sosiologis di Pekalongan mencakup tiga aspek ketahanan yaitu 1) Kontestasi Ketahanan normative melalui kompleksitas dalam menjaga stabilitas keuangan seperti LDR, NPL, dan ROA, 2) kontestasi ketahanan ideologis mencerminkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan pasar seperti pengembangan produk, marketing produk religious dan investasi 3) Kontestasi ketahanan sosiologis. Mencerminkan tantangan yang

kompleks dalam menjaga keseimbangan antara adaptasi teknologi, pelaksanaan CSR, kiprah sosial dan membangun kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A. (2016). Ketahanan Sektor Keuangan Dan Shadowbanking: Analisa Terhadap Industri Pembiayaan Di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 16(3), 27-54.
- Ascarya (2009), "Pelajaran yang dapat dipetik dari Krisis Berulang: Perpektif Ekonomi Islam", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 12 Nomor 1 Juli 2009, pp. 33-82.
- Faiz, I. (2010). Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global. *La_Riba*, 4(2), 217-237.
- Hall, S. (1977). The Hinterland of science: Ideology and the sociology of knowledge. *On ideology*, 10.
- Hidayat, J. (2009). Desain Sebagai Fenomena Ideologi. *Dimensi Interior*, 5(1), 34-43.
- Mansyur, M. A. (2011). Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 67-75.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi sosial dalam realitas sosial. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1-4.
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial.
- NOEVITA SARY, Y. U. N. N. Y. (2015). Hegemoni Ekonomi Syariah. *Paradigma*, 3(2).
- Pangiuk, A. (2013). Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi: Menurut Al-Maqrizi. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(1).
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35.
- Rahman, M. E. (2016). Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah Di

- Indonesia Dengan Ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 1(1), 79-88.
- Rehmann, J. (2007). Ideology theory. *Historical Materialism*, 15(4), 211-239.
- Saifuddin, R. (2016). Integerasi Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(03), 208-222.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- sectors in Indonesia. *Developing ASEAN Economic Community (AEC) into a global services Hub*, 173-270.
- Tsujimoto, M., Kajikawa, Y., Tomita, J., & Matsumoto, Y. (2018). A review of the ecosystem concept—Towards coherent ecosystem design. *Technological Forecasting and Social Change*, 136, 49-58.
- Tayibnapis, A. Z., Wuryaningsih, L. E., & Gora, R. (2018). The development of digital economy in Indonesia. *IJMBS International Journal of Management and Business Studies*, 8(3), 14-18.